

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: untuk mengetahui apakah penerapan penggunaan arsip elektronik untuk minuta akta notaris dapat memberikan kepastian hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, sumber data diperoleh dari kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, skunder, bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan *bahwa* penggunaan arsip elektronik sebagai minuta akta notaris belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Substansi hukum dalam penggunaan arsip elektronik sebagai minuta akta notaris belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dengan adanya kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi notaris.

UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris, juga tidak memberikan peluang untuk pembuatan akta secara elektronik dengan memberikan batasan terhadap akta notaris tidak termasuk dalam dokumen/informasi elektronik, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Ketidaksiuaian antara UUJN dengan UU ITE, terkait kewenangan notaris dalam penggunaan arsip elektronik jelas menjadi hambatan tersendiri bagi notaris.

Substansi hukum yang ada saat ini belum mampu memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat. Karena substansi hukum tersebut belum mengakomodir kepentingan masyarakat, aturan hukum yang ada tidak mampu beradaptasi dengan hal-hal baru yang terjadi di masyarakat, sehingga berdampak tidak adanya jaminan kepastian hukum. Substansi hukum belum bersifat futuristik, karena pengaturan kewenangan notaris tidak dapat mengantisipasi kejadian yang mungkin muncul dikemudian hari, yaitu tuntutan masyarakat agar notaris mampu membuat akta secara elektronik. Struktur hukum yang dibangun belum mampu mendorong terlaksananya pelayanan jasa secara elektronik oleh notaris dengan baik dan maksimal. Ditambah lagi budaya hukum masyarakat yang cenderung lebih percaya menggunakan fasilitas konvensional dibanding dengan teknologi.

Kata kunci : Kepastian Hukum; Arsip Elektronik; Minuta akta Notaris; Peraturan Perundang-undangan.

Abstract

This study aims to determine whether the application of the use of electronic archives for notarial deeds can provide legal certainty. The approach method in this research is normative legal, the data source is obtained from the literature and the legal materials are used as primary, secondary and tertiary legal materials which are then analyzed by qualitative analysis.

Based on the data analysis, it can be concluded that the use of electronic archives as an original of notary deeds has not obtained a strong legal basis, so that it does not guarantee legal certainty. Legal certainty can be achieved, if there are no conflicting provisions between one regulation to another. The legal substance in the use of electronic archives as a minimum of notary deeds has not been fully accommodated in the UUJN with the obligation to read the deed in the presence of witnesses and failure to fulfill this requirement will result in legal sanctions for the notary.

UU ITE, which is a legal basis for notaries, also does not provide an opportunity for electronic deeds by providing restrictions on notary deeds that are not included in electronic documents / information, so that they cannot be used as valid evidence. The incompatibility between the UUJN and the UU ITE, related to the authority of notaries in using electronic records, is clearly an obstacle for notaries.

The current legal substance has not been able to facilitate the various interests because the substance of the law has not accommodated the interests of the community, the existing regulations are not able to adapt to the new technological custom of society. As a result, in the absence of legal certainty. The substance of the law is not yet futuristic, because the regulation of the notary's authority cannot anticipate the problem that may arise in the future, namely the demands of the public for notary to be able to make deeds electronically. The legal structure that was built has not been able to encourage the implementation of electronic services properly and optimally. In addition, the legal culture of the community tends to believe more in using conventional facilities instead of technology.

Key words: Legal Certainty; Electronic Archives; Notary Deed; Legal act.